



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**PERUBAHAN  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
2024**

**DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KOTA YOGYAKARTA  
2024**

## KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini merupakan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2024 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta,            Juli 2024  
Kepala  
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kota Yogyakarta

ttd.

**Drs. Maryustion Tonang, M.M.**  
NIP. 19660614 199403 1 006

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional Berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-Undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya .

Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, strategi, sasaran, tujuan, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Adapun tujuan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasi diantaranya adalah:

1. Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial
2. Menurunkan angka pengangguran

3. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja
4. Meningkatkan kualitas kerjasama transmigrasi
5. Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sedangkan sasaran strategis dari Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasi antara lain:

1. Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial
2. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
3. Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja
4. Meningkatnya kualitas kerjasama transmigrasi
5. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Renja OPD dapat diubah apabila terdapat hal yang tidak sesuaidengan dinamika tahun berjalan, seperti antara lain:

1. Perkembangan situasi kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Berkenaan dengan dinamika kebijakan Pemerintah Kota dan Pemerintah Daerah yang lebih tinggi, maka Renja dan anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengalami beberapa kali pergeseran dan perubahan anggaran. Perubahan Renja OPD ditetapkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Renja, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
11. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
12. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

13. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26);

22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);
23. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
24. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 57);
25. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 37);
26. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Selain itu perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta memenuhi dinamika kebutuhan yang muncul di pertengahan tahun berjalan.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta antara lain:

1. Sebagai koridor pelaksanaan program kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta pada Triwulan ke-4 Tahun 2024;
2. Sebagai bahan acuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**BAB I       PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

**BAB    II   EVALUASI   PELAKSANAAN   RENJA   PERANGKAT   DAERAH  
      TRIWULAN II TAHUN 2024**

**BAB III       RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM  
      PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

**BAB IV       PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024**

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terdapat lima kriteria penilaian realisasi kinerja, yaitu: (1) Sangat Tinggi, dengan nilai  $x > 90$ ; (2) Tinggi, dengan nilai  $75 < x \leq 90$ ; (3) Sedang, dengan nilai  $65 < x \leq 75$ ; (4) Rendah, dengan nilai  $50 < x \leq 65$ ; dan (5) Sangat Rendah, dengan nilai  $x < 50$ .

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mengacu pada hasil laporan evaluasi Renja dan Pengukuran Kinerja Triwulan II Tahun 2024 (sebagaimana Tabel 2.1.) sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dari target fisik Renja yaitu pencapaian nilai SAKIP A, pada Triwulan II ini belum dapat direalisasikan mengingat bahwa penilaian SAKIP sifatnya tahunan. Dengan demikian pencapaian fisik program ini baru dapat dinilai keberhasilannya di akhir Tahun 2024. Program ini dijabarkan ke dalam 8 kegiatan dengan capaian realisasi keuangan sebesar 67,16% (Rp 6.323.875.638,-) dari target keuangan pada TW II (Rp 9.416.038.040 ).
2. Program Pemberdayaan Sosial dijabarkan menjadi 1 kegiatan. Adapun dari target fisik TW II sebesar 90,69% berhasil direalisasikan sebesar 90,69% (tingkat realiasi capaian 100%). Dan dari aspek keuangan telah tercapai 84,09% (Rp 236.833.100) dari target sebesar Rp 281.656.100 pada TW II.
3. Program Rehabilitasi Sosial dijabarkan menjadi 2 kegiatan yang mengakomodasi kegiatan rehabilitasi oleh unit kerja UPT RPA Wilosoprojo, UPT RPSLUT Budhi Dharma dan oleh Dinas Sosnakertrans. Terdapat 7 (tujuh) indikator program Rehabilitasi Sosial, yaitu
  - a. Indikator Persentase Jumlah Warga Negara Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti dengan target fisik pada TW II sebesar 100% dan berhasil direalisasikan sebesar

- 100%.
- b. Indikator Ke-2 Adalah Persentase Jumlah Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti dengan target fisik di TW II sebesar 100% berhasil direalisasikan 100%.
  - c. Indikator ke-3 adalah Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usiatelantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luarpanti dengan target fisik di TW II sebesar 100% berhasil direalisasikan 100%.
  - d. Indikator ke-4 adalah Persentase Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti dengan target fisik di TW II sebesar 100% berhasil direalisasikan 100%.
  - e. Indikator ke- 5 adalah Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri dengan target fisikdi TW II sebesar 44,75% berhasil direalisasikan 44,75% (tingkat realiasi capaian 100%).
  - f. Indikator ke-6 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial dengan target fisik di TW II sebesar 50% berhasil direalisasikan 56,25% (tingkat realiasi capaian 112,50%).
  - g. Indikator ke-7 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial dengan target fisik di TW II sebesar 100% berhasil direalisasikan 100%.
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dijabarkan dalam menjadi 1 kegiatan. Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial dengan target fisik di TW II sebesar 65,40%, berhasil direalisasikan sebesar 99,20% (tingkat realiasi capaian 112%). Dan dari aspek keuangan telah tercapai 88,74% (Rp. 276.239.600,-) dari target sebesarRp. 311.302.400,- pada TW II.
  5. Program Penanganan Bencana dijabarkan dalam menjadi 2 kegiatan. Adapun dari target fisik renja TW II sebesar 100%, berhasil direalisasikan sebesar 100%. Dan dari aspek keuangan telah tercapai 67,45% (Rp. 211.630.850,-) dari target sebesar Rp. 313.770.050,- pada TW II.
  6. Program Perencanaan Tenaga Kerja dimanifestasikan dalam kegiatan Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro. Berdasarkan target fisik Renja TW II sebesar 44,33% dapat direalisasikan sebesar 48.83% (tingkat realiasi capaian 104,41%). Adapun pencapaian realisasi keuangan sebesar 100% (Rp.11.042.400,-) dari Rp. 11.042.400,- (target TW II).
  7. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dimanifestasikan dalam 3 kegiatan, mencapai realisasi fisik sebesar 49,63% (tingkat realiasi capaian 117,3%) dari target TW II sebesar 42,31%. Adapun pencapaian realisasi keuangan sebesar 77,17% (Rp.672.468.600,-) dari target TW II

sebesar Rp. 871.376.560,-.

8. Program Penempatan Tenaga Kerja dimanifestasikan dalam 2 kegiatan, mencapai realisasi fisik sebesar 74,22% dari target TW II sebesar 68,06%. Adapun pencapaian realisasi keuangan sebesar 93,51% (Rp. 663.281.550,-) dari target TW II sebesar Rp. 726.641.650,-.
9. Program Hubungan Industrial dimanifestasikan dalam 2 kegiatan, mencapai realisasi fisik sebesar 22,66% dari target TW II sebesar 22,63%. Adapun pencapaian realisasi keuangan sebesar 90,95% (Rp. 620.248.127,-) dari target TW II sebesar Rp. 681.997.640,-.
10. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dimanifestasikan dalam 1 kegiatan. Target pada triwulan II masih 0% dikarenakan pemberangkatan transmigran direncanakan terealisasi pada triwulan IV. Adapun pencapaian realisasi keuangan sebesar 100% (Rp.41.346.900,-) dari target TW II sebesar Rp.41.346.900,-..

Adapun matriks Evaluasi terhadap Hasil Renja Triwulan II adalah sebagai berikut :

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJAPERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
TAHUN 2024**

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	89.78 %
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.82 - 6.98 %
3	Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Persentase Perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah	4.6-5.4 %
4	Meningkatnya kualitas kerjasama transmigrasi	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigran	18.75 %
5	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hasil Nilai Reformasi Birokrasi	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW II Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	<b>Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	<b>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	<b>A Nilai</b>	<b>0,00</b>	<b>A Nilai</b>	<b>0,00</b>	<b>A Nilai</b>	<b>13.770.580.656,00</b>	<b>84,5% Nilai</b>	<b>9.416.038.040,00</b>	<b>89,58% Nilai</b>	<b>6.323.875.638,00</b>	<b>106%</b>	<b>67,16%</b>					<b>SEKRETARIAT</b>	
	<b>Perencanaan</b>	<b>ganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>								<b>180.717.320,00</b>	<b>80.611,2</b>	<b>0,00</b>	<b>77.588.500,0</b>	<b>96.25%</b>								
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0,00		0,00		14.339.800,00	80,00%		11.451.540,00	80,00%	9.451.500,00	100,00%	82,53%					
			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		80,00%		80,00%		100,00%							
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0,00		0,00		2.670.000,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0,00		0,00		2.670.000,00	59,00%		1.380.000,00	59,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%					
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		59,00%		59,00%		100,00%							
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			0,00		0,00		3.938.720,00	100,00%		3.938.720,00	100,00%	3.930.000,00	100,00%	99,78%					
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			0,00		0,00		3.938.720,00	20,00%		690.000,00	20,00%	220.000,00	100,00%	31,88%					
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		20,00%		20,00%		100,00%							
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0,00		0,00		153.160.080,00	46,58%		63.151.000,00	46,58%	62.607.000,00	100,00%	99,14%					
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		11 laporan		0,00%		46,58%		0,00%							
	<b>Administrasi K</b>	<b>uangan Perangkat Daerah</b>								<b>10.868.495.800,00</b>	<b>8.265.8</b>	<b>.630,00</b>	<b>5.332.172</b>	<b>67,00</b>	<b>6</b>	<b>.51%</b>						

	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			0,00	0,00		10.765.740.000,00	76,00%	8.222.675.630,00	76,00%	5.289.307.167,00	100,00%	64,33%							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang	0 Orang		80 Orang		76,00%		76,00%		100,00%								
	2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0,00	0,00		102.755.800,00	43,06%	43.149.000,00	43,06%	42.865.000,00	100,00%	99,34%							
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen		11 Dokumen		0,00%		43,06%		0,00%								
	<b>Administrasi B ang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>							<b>56.130.000,00</b>	<b>23.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.244.000,00</b>	<b>99,99%</b>									
	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0,00	0,00		2.280.000,00	25,00%	488.000,00	25,00%	488.000,00	100,00%	100,00%							
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0 dokumen		2 dokumen		25,00%		25,00%		100,00%								
	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			0,00	0,00		1.710.000,00	100,00%	1.710.000,00	100,00%	1.709.000,00	100,00%	99,94%							
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			0,00	0,00		3.990.000,00	45,00%	1.760.000,00	45,00%	1.759.000,00	100,00%	99,94%							
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan	0 Laporan		1 Laporan		45,00%		47,00%		104,44%								
	4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00	0,00		4.536.000,00	41,67%	1.854.000,00	41,67%	1.854.000,00	100,00%	100,00%							
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0 Laporan		12 Laporan		41,67%		41,67%		100,00%								
	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00	0,00		42.189.000,00	41,67%	17.434.000,00	41,67%	17.434.000,00	100,00%	100,00%							
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0 Laporan		12 Laporan		41,67%		41,67%		100,00%								
	6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0,00	0,00		1.425.000,00	0,00%	0,00	3,00%	0,00	0,00%	0,00%							
		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0 dokumen		1 dokumen		0,00%		3,00%		0,00%								
	<b>Administrasi K pegawai Perangkat Daerah</b>							<b>53.511.000,00</b>	<b>21.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.353.300,00</b>	<b>100%</b>									
	1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			0,00	0,00		50.034.000,00	41,67%	20.710.000,00	41,67%	20.710.000,00	100,00%	100,00%							
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0 Dokumen	0 Dokumen		12 Dokumen		41,67%		41,67%		100,00%								
	2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			0,00	0,00		907.000,00	0,00%	0,00	2,50%	0,00	0,00%	0,00%							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		0 Dokumen	0 Dokumen		4 Dokumen		0,00%		2,50%		0,00%								
	3	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			0,00	0,00		2.570.000,00	29,17%	644.000,00	29,17%	643.300,00	100,00%	99,89%							
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen	0 dokumen		120 dokumen		29,17%		29,17%		100,00%								
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>652.426.986,00</b>	<b>246.494,00</b>	<b>00,00</b>	<b>214.603.230,00</b>	<b>87,0 %</b>									
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0,00	0,00		10.673.400,00	87,50%	9.000.000,00	87,50%	8.996.260,00	100,00%	99,96%							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0 Paket		2 Paket		87,50%		87,50%		100,00%								
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0,00	0,00		111.940.836,00	52,80%	57.792.000,00	52,80%	55.581.950,00	100,00%	96,18%							
		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0 Paket	0 Paket		8 Paket		0,00%		52,80%		0,00%								

	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0,00	0,00	30.364.000,00	50,00%	15.000.000,00	50,00%	14.999.600,00	100,00%	100,00%						
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	2 Paket		50,00%		50,00%		100,00%							
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			0,00	0,00	29.343.750,00	37,50%	10.450.000,00	37,50%	10.396.500,00	100,00%	99,49%						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	4 Paket		37,50%		37,50%		100,00%							
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			0,00	0,00	5.700.000,00	50,00%	2.790.000,00	50,00%	2.790.000,00	100,00%	100,00%						
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0,00	0,00	382.596.000,00	31,76%	116.299.000,00	31,76%	86.906.022,00	100,00%	74,73%						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan	0 laporan	106 laporan		0,00%		31,76%		0,00%							
	7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			0,00	0,00	45.807.000,00	45,50%	19.838.000,00	45,50%	19.609.900,00	100,00%	98,85%						
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen		45,50%		45,50%		100,00%							
	8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			0,00	0,00	36.002.000,00	45,50%	15.325.000,00	45,50%	15.323.000,00	100,00%	99,99%						
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen		45,50%		45,50%		100,00%							
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>217.052.350,00</b>	<b>145,11%</b>	<b>50,00</b>	<b>89.586.050</b>	<b>0 61,74%</b>								
	1	Pengadaan Mebel			0,00	0,00	57.450.000,00	4,38%	2.500.000,00	4,38%	2.500.000,00	100,00%	100,00%						
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 unit	0 unit	16 unit		4,38%		4,38%		100,00%							
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00	0,00	159.602.350,00	89,35%	142.610.350,00	89,35%	87.086.050,00	100,00%	61,07%						
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 unit	0 unit	22 unit		0,00%		89,35%		0,00%							
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>1.208.983.000,00</b>	<b>521,35%</b>	<b>00,00</b>	<b>465.385,10</b>	<b>0 89,2%</b>								
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0,00	0,00	83.048.000,00	45,83%	36.290.000,00	45,83%	36.290.000,00	100,00%	100,00%						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan		45,83%		45,83%		100,00%							
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			0,00	0,00	8.400.000,00	41,67%	3.300.000,00	41,67%	3.175.023,00	100,00%	96,21%						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan		41,67%		41,67%		100,00%							
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			0,00	0,00	1.117.535.000,00	50,96%	481.765.300,00	50,96%	425.920.086,00	100,00%	88,41%						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan		0,00%		50,96%		0,00%							
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>533.264.200,00</b>	<b>112,04%</b>	<b>00,00</b>	<b>99.943.280</b>	<b>0 89,2%</b>								
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			0,00	0,00	25.030.000,00	48,00%	11.770.000,00	48,00%	8.456.500,00	100,00%	71,85%						
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0 Unit	0 Unit	1 Unit		48,00%		48,00%		100,00%							
	2	Penyediaan Jasa			0,00	0,00	285.720.200,00	22,56%	63.622.500,00	22,56%	56.090.604,00	100,00%	88,16%						

		Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0 Unit	48 Unit	0,00%	23,63%	0,00%											
	3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	15 Unit	38,00%	38,00%	100,00%	74,50%										
	4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	40 Unit	23,75%	23,75%	100,00%	97,61%										
	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	3 Unit	0,00%	14,03%	0,00%											
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>										<b>100,00%</b>	<b>91,30%</b>									
<b>Predikat kinerja</b>										<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>									
<b>Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif</b>	<b>Rerata persentase PSKS yang aktif secara individu, lembaga maupun jejaring</b>	<b>93,14 %</b>	<b>0,00</b>	<b>90,69 %</b>	<b>0,00</b>	<b>91,27 %</b>	<b>616.031.100,00</b>	<b>90,69 %</b>	<b>281.656.100,00</b>	<b>90,69 %</b>	<b>236.833.100,00</b>	<b>100%</b>	<b>84,09%</b>					<b>BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL</b>
<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>									<b>616.031.100,00</b>	<b>281.656.100,00</b>	<b>236.833.100,00</b>	<b>84,09%</b>								
	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 orang	0 orang	105 orang	0,00%	58,85%	0,00%											
	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya	0 orang	0 orang	14 orang	0,00%	38,34%	0,00%											
	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0 keluarga	0 keluarga	12 keluarga	52,46%	52,46%	100,00%	95,65%										
	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	0 lembaga	0 lembaga	4 lembaga	0,00%	45,15%	0,00%											
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>										<b>100,00%</b>	<b>90,49%</b>									
<b>Predikat kinerja</b>										<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>									
<b>Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar</b>	<b>(Jumlah anak terlantar yang tertangani/Jumlah anak terlantar) dikali 100%</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>3.478.685.386,00</b>	<b>100 %</b>	<b>1.665.514.480,00</b>	<b>100 %</b>	<b>1.422.876.661,00</b>	<b>100%</b>	<b>110,02%</b>					<b>BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL</b>



		Permakanan Upt Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	0 orang	0 orang	65 orang	0,00%		60,21%	0,00%									
	2	Penyediaan Permakanan Upt Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang	22 Orang	0,00%	289.431.000,00	58,51%	166.502.000,00	57,82%	139.691.800,00	98,82%	83,90%					
	3	Penyediaan Sandang Upt Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	0 Orang	0 Orang	22 Orang	79,26%	50.164.000,00	79,26%	39.256.000,00	76,00%	31.268.300,00	95,89%	79,65%					
	4	Penyediaan Sandang Upt Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	0 orang	0 orang	65 orang	0,00%	111.341.000,00	64,00%	69.610.000,00	64,00%	66.139.000,00	100,00%	95,01%					
	5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	0 Presentase	0 Presentase	100 Presentase	50,00%	4.590.000,00	50,00%	2.105.000,00	50,00%	1.830.000,00	100,00%	86,94%					
	6	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Upt Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	0 orang	0 orang	1 orang	50,00%	19.255.000,00	50,00%	9.413.000,00	50,00%	8.152.062,00	100,00%	86,60%					
	7	Pemberian Bimbingan FisikMentalSpiritual dan Sosial Upt Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	0 orang	0 orang	65 orang	0,00%	630.745.861,00	50,36%	294.842.980,00	50,36%	258.768.131,00	100,00%	87,76%					
	8	Pemberian Bimbingan FisikMentalSpiritual dan Sosial Upt Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang	22 Orang	61,00%	70.825.000,00	61,00%	42.325.000,00	61,00%	39.950.000,00	100,00%	94,39%					
	9	Pemberian Bimbingan FisikMentalSpiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang	3.620 Orang	0,00%	138.764.000,00	50,93%	67.885.000,00	50,93%	64.990.000,00	100,00%	95,74%					
	10	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	0 Orang	0 Orang	260 Orang	0,00%	126.880.000,00	31,00%	27.874.000,00	26,28%	20.730.000,00	84,77%	74,37%					
	11	Pemberian Bimbingan						144.216.000,00	49,98%	60.090.000,00	49,98%	60.090.000,00	100,00%	100,00%					

		Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Upt Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota		0 Orang		0 Orang	22 Orang		0,00%		49,98%		0,00%							
	12	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/ Kota		0		0	100		53,00%		53,00%		100,00%							
	13	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota		0 Orang		0 Orang	200 Orang		0,00%		36,21%		0,00%							
	14	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Upt Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota		0 Orang		0 Orang	22 Orang		0,00%		41,22%		0,00%							
	15	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota		0 %		0 %	100 %		45,00%		45,00%		100,00%							
	16	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		0 %		0 %	100 %		47,00%		40,00%		85,11%							
<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>									<b>469.428.025,00</b>		<b>144.690.600,00</b>		<b>135.090.500,00</b>		<b>93,37%</b>						
	1	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota		0 orang		0 orang	500 orang		26,00%		26,00%		100,00%							
	2	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota		0 Orang		0 Orang	55 Orang		0,00%		25,81%		0,00%							
	3	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota		0 Orang		0 Orang	150 Orang		0,00%		43,72%		0,00%							
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>													<b>97,72%</b>	<b>88,66%</b>							
<b>Predikat kinerja</b>													<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>							

Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Rerata persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/keluarga	90,36 %	0,00	94,08 %	0,00	89,25 %	1.973.912.500,00	65,40 %	311.302.400,00	99,20 %	276.239.600,00	112%	88,74%					<b>BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>		
<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>									<b>1.973.912.500,00</b>	<b>311.302.000,00</b>	<b>00,00</b>	<b>276.239.600,00</b>	<b>00 88,7 %</b>									
	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	0 orang		0 orang		144.101 orang	1.635.880.500,00	25,53%	189.621.400,00	25,53%	159.396.600,00	100,00%	84,06%							
	2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 KPM		0 KPM		32.748 KPM	327.902.000,00	40,75%	119.861.000,00	40,70%	115.348.000,00	99,88%	96,23%							
	3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang		0 Orang		70 Orang	10.130.000,00	21,00%	1.820.000,00	21,00%	1.495.000,00	100,00%	82,14%							
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>													<b>99,96%</b>	<b>87,48%</b>								
<b>Predikat kinerja</b>													<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>								
Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	(Jumlah korban bencana alam, non alam dan sosial yang tertangani/Jumlah korban bencana alam, non alam dan sosial yang seharusnya tertangani) dikali 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	633.701.650,00	100 %	313.770.050,00	100% %	211.630.850,00	100%	67,45%					<b>KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>		
<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>									<b>228.015.000,00</b>	<b>107.568.000,00</b>	<b>00,00</b>	<b>32.234.350,00</b>	<b>0 29,97 %</b>									
	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3 x 1 hari dalam Masa Tanggap darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	0 orang		0 orang		150 orang	226.585.000,00	49,92%	107.128.000,00	49,92%	31.794.350,00	100,00%	29,68%							
	2	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 orang		0 orang		65 orang	715.000,00	32,80%	220.000,00	32,80%	220.000,00	100,00%	100,00%							
	3	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	0 orang		0 orang		65 orang	715.000,00	32,80%	220.000,00	32,80%	220.000,00	100,00%	100,00%							



Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Rendah					
<b>Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase penempatan tenaga kerja</b>	<b>((jumlah tenaga kerja yang ditempatkan)/ jumlah lowongan kerja)*100%</b>	<b>75,95 %</b>	<b>0,00</b>	<b>84,88 %</b>	<b>0,00</b>	<b>75,69 %</b>	<b>1.085.531.250,00</b>	<b>68,06 %</b>	<b>726.641.650,00</b>	<b>74,22% %</b>	<b>663.281.550,00</b>	<b>109%</b>	<b>93,51%</b>					<b>BIDANG PENGEMBANGAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>
<b>Pelayanan Ant</b>	<b>kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>880.626.900,00</b>	<b>698.384</b>	<b>50,00</b>	<b>638.734.45</b>	<b>00 91.4 %</b>							
	1	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	0 Orang		0 Orang		300 Orang	15.000.000,00	48,00%	6.124.000,00	50,00%	6.124.000,00	104,17%	100,00%					
	2	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	0 Orang		0 Orang		604 Orang	16.010.000,00	38,00%	5.785.000,00	40,00%	3.885.000,00	105,26%	67,16%					
	3	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	0 Orang		0 Orang		193 Orang	849.616.900,00	83,77%	686.475.550,00	84,41%	628.725.450,00	100,76%	91,59%					
<b>Pengelolaan In</b>	<b>formasi Pasar Kerja</b>								<b>204.904.350,00</b>	<b>28.257</b>	<b>0,00</b>	<b>24.547.100,0</b>	<b>86.87%</b>							
	1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	0 Orang		0 Orang		200 Orang	83.684.350,00	35,00%	28.257.100,00	37,00%	24.547.100,00	105,71%	86,87%					
	2	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/bursa kerja	0 Orang		0 Orang		1.350 Orang	121.220.000,00	0,28%	0,00	0,29%	0,00	103,57%	0,00%					
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>														<b>103,90%</b>	<b>69,12%</b>					
<b>Predikat kinerja</b>														<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sedang</b>					
<b>Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial</b>	<b>((Jumlah perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial / jumlah perusahaan) * 100 %</b>	<b>46,03 %</b>	<b>0,00</b>	<b>40,94 %</b>	<b>0,00</b>	<b>42,27 %</b>	<b>1.577.501.780,00</b>	<b>22,63 %</b>	<b>681.997.640,00</b>	<b>22,66% %</b>	<b>620.248.127,00</b>	<b>100,11%</b>	<b>90,95%</b>					<b>BIDANG KESEJAHTERAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>
<b>Pengesahan P</b>	<b>aturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>233.729.950,00</b>	<b>82.143</b>	<b>0,00</b>	<b>76.196.750,0</b>	<b>92.76%</b>							
	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online	0 Perusahaan		0 Perusahaan		448 Perusahaan	21.712.250,00	87,00%	18.137.250,00	87,00%	17.561.250,00	100,00%	96,82%					
	2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama	0 Perusahaan		0 Perusahaan		15 Perusahaan	16.895.500,00	90,00%	15.148.500,00	90,00%	14.546.500,00	100,00%	96,03%					
	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai	0 laporan		0 laporan		362 laporan	195.122.200,00	26,03%	48.858.000,00	26,03%	44.089.000,00	100,00%	90,24%					

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		1.343.771.830,00	599.853	90,00	544.051.37	00	90.7																
1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	0 Perkara	0 Perkara	4 Perkara	204.016.950,00	75,27%	151.866.950,00	75,27%	128.366.950,00	100,00%	84,53%													
2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	0 Perkara	0 Perkara	24 Perkara	23.749.500,00	88,00%	17.386.500,00	88,00%	17.386.500,00	100,00%	100,00%													
3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	2 Asosiasi dan Serikat Pekerja	78.102.500,00	49,98%	34.725.500,00	49,98%	20.995.000,00	100,00%	60,46%													
4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	0 Lembaga	0 Lembaga	1 Lembaga	93.220.000,00	56,00%	47.960.000,00	56,00%	40.438.000,00	100,00%	84,32%													
5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	0 orang	0 orang	159 orang	944.682.880,00	39,24%	347.914.940,00	39,24%	336.864.927,00	100,00%	96,82%													
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>											<b>100,00%</b>	<b>88,65%</b>													
<b>Predikat kinerja</b>											<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>													
<b>Meningkatnya kualitas kerjasama transmigrasi</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Persentase penempatan transmigran</b>	<b>(Jumlah calon transmigran yang berangkat /Jumlah kuota transmigran)*100%</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>226.881.425,00</b>	<b>100 %</b>	<b>41.346.900,00</b>	<b>0 %</b>	<b>41.346.900,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>BIDANG PENGEMBANGAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>									
<b>Penataan Persbaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota</b>									<b>226.881.425,00</b>	<b>41.346.</b>	<b>0,00</b>	<b>41.346.900,00</b>	<b>100%</b>												
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 KK	0 KK	8 KK	49.270.000,00	45,00%	19.861.900,00	47,00%	19.861.900,00	104,44%	100,00%													
2	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	0 Kepala Keluarga	0 Kepala Keluarga	8 Kepala Keluarga	50.133.500,00	50,00%	21.485.000,00	52,00%	21.485.000,00	104,00%	100,00%													
3	Pelatihan Transmigrasi	Pelatihan Transmigrasi	0 Orang	0 Orang	8 Orang	43.477.925,00	9,00%	0,00	10,00%	0,00	111,11%	0,00%													
4	Penyesuaian					84.000.000,00	12,00%	0,00	13,00%	0,00	108,33%	0,00%													

	Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi	0 KK	0 KK	8 KK	12,00%	13,00%	108,33%																					
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>									<b>106,97%</b>	<b>50,00%</b>																			
<b>Predikat kinerja</b>									<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Rendah</b>																			
<b>Total anggaran dari seluruh program</b>						<b>25.140.570</b>	<b>57,00</b>	<b>14.320.686,2</b>	<b>20,00</b>	<b>1</b>	<b>.479.843.426,00</b>																		
<b>Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 10) (%)</b>									<b>100,09%</b>	<b>73,18%</b>																			
<b>Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 10)</b>									<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sedang</b>																			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: "1. Adanya tim pendampingan PSKS seperti Tim Pendampingan WKSBM, Tim Pendampingan LKS, Tim Pendampingan IPSM, dan Tim Pendampingan Karang Taruna. 2. Adanya kegiatan monev tim pendampingan PSKS 3. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait penanganan anak terlantar 4. Kerjasama dan koordinasi yang baik dgn berbagai stakeholder terkait dalam penanganan Gepeng 5. Baiknya hasil koordinasi, kerjasama dan komunikasi dari semua pihak sehingga penanganan lansia terlantar dapat tertangani dengan lancar 6. Koordinasi antara stakeholder yang baik dan solidnya tim pendamping penyanggandisabilitas 7. Telah terbentuk tim monitoring KUBE 8. Telah tersusun Kriteria Tingkat Perkembangan KUBE (Tumbuh, Berkembang, Mandiri) 9. Pekerja Sosial dan Pendamping Rehabilitasi Sosial bisa dimaksimalkan perannya dalam penanganan dan pendampingan ABH 10. Sudah terjalin komunikasi yang baik antara stake holder terkait penanganan pemakaman jenazah terlantar, santunan kematian, dan penanganan orang terlantar kehabisan bekal 11. pendamping bantuan sosial Proaktif dalam memfasilitasi pencairan bantuan dan mengadvokasi permasalahan yang dialami KPM 12. Sudah terjalin komunikasi yang baik antara stake holder terkait penanganan bencana 13. Pelatihan yang animo masyarakatnya tinggi, dap 14. Tingginya tingkat partisipasi pencari kerja dalam mengikuti seleksi lowongan yang difasilitasi oleh Dinas melalui JSS -Partisipasi BKK dalam menginformasikan lowongan di grup alumninya. 15. Pembinaan yang intensif yang dilakukan oleh mediator dan Dinas terkait (Kementerian maupun Provinsi DIY) 16. Sudah dilakukan koordinasi dengan kelurahan untuk proses penjangingan minat catrans melalui sosialisasi KIE Transmigrasiat terlaksana sesuai tata kala."																												
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Kurangnya regenerasi kepengurusan 2. Beberapa pengurus memiliki pekerjaan lain sehingga kurang aktif berkegiatan 3. Kurangnya tanggung jawab keluarga dalam merawat anak terlantar; 4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penanganan anak terlantar 5. Kejadian tidak dapat diprediksi 6. Keterbatasan layanan di camp assesment 7. Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dari pihak keluarga atau kerabat dekat dalam menangani lansia, sehingga semua masalah diserahkan pada pemerintah 8. Tidak adanya tempat penampungan/ shelter untuk ODGJ terlantar 9. Sulitnya untuk upgrade kompetensi Penyandang Disabilitas 10. Masih diperlukan rapat dan koordinasi intensif dengan tim monitoring KUBE karena baru terbentuk tahun ini dan belum memahami tugas serta fungsinya 11. Kondisi perekonomian makro wilayah belum mendukung dunia usaha mikro 12. Kasus ABH tidak bisa diprediksi 13. Surat permohonan dari kepolisian ataupun rujukan dari Kab lain sering terlambat disampaikan sedangkan waktu untuk proses hukum sudah mendekati limit penahanannya 14. Pemakaman jenazah terlantar, santunan kematian, dan orang terlantar kehabisan bekal tidak bisa diprediksi (sifatnya adang-adang) 15. Parameter perwal DTKS belum Fix 16. Tidak ada BNBA Penerima Bansos 17. Tidak ada laporan alokasi dan realisasi dari penyalur 18. Kejadian yang ditangani bersifat insidental (tidak dapat di prediksi) 19. Terdapat pelatihan yang mundur dari tata kala karena belum penuhnya kuota peserta pelatihan (Pelatihan Event Organizer dan Pelatihan Tata Rias Kecantikan). 20. Lokasi lowongan yang dicari oleh Pencaker rata-rata di Luar DIY, sedangkan informasi lowongan kerja yang terdata di Dinas kebanyakan di DIY 21. Ada beberapa perusahaan yang masih belum menindaklanjuti peraturan jika belum ada temuan dari pihak pengawas 22. sanksi yang diterapkan kurang memberi efek jera/ shock terapi bagi perusahaan 23. Kebijakan terkait kuota, lokasi transmigrasi, dan anggaran tersentral di Pusat																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:																												
										Yogyakarta,					2024					Yogyakarta,					2024				
										Disusun oleh					Dievaluasi oleh														
										Kepala DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH														
										Drs. Maryustion Tonang, M.M NIP. 196606141994031006					Agus Tri Haryono, ST, MT NIP. 197203061996031004														

Evaluasi atas capaian kinerja dalam Tabel 2.1. tersebut di atas tampak bahwa dari capaian keseluruhan program merefleksikan bahwa Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi berpredikat Sangat Tinggi dari aspek capaian fisik (99,98 %) namun Rendah dari aspek capaian keuangan (59,13%). Ketimpangan pencapaian realisasi fisik dan keuangan pada Triwulan II disebabkan adanya faktor penghambat sebagai berikut:

1. Perlunya sinkronisasi dengan kebijakan tingkat atas (pusat dan atau DIY), yaitu antara lain terkait kebijakan pemberian bantuan sosial dan kebijakan pemberangkatan transmigrasi;
2. Adanya mekanisme pergeseran anggaran yang harus diikuti oleh Dinsosnakertrans dalam rangka penyesuaian plotting dan rekening diSIPD. Hal ini menyebabkan mundurnya tatakala pelaksanaan beberapa kegiatan/sub kegiatan;
3. Adanya pengunduran tatakala pelaksanaan sub kegiatan karena adanya permohonan warga masyarakat, keterlambatan penerbitan dasar hukum pelaksanaan sub kegiatan yang harus memperoleh persetujuan dari Kemendagri, lokus sub kegiatan yang tidak memungkinkan kondisinya untuk terlaksananya sub kegiatan;
4. Sifat sub kegiatan *unpredictable* / adang-adang, dalam artian pelaksanaan kegiatan sebagai langkah responsif penanganan sosial sesuai ada tidaknya kejadian, permohonan dan menyesuaikan kebutuhan di lapangan.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja Perangkat Daerah sampaidengan Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Adanya dukungan sarana dan prasarana;
2. Komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan;
3. Optimalisasi koordinasi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam skema penguatan jejaring terlaksana dengan baik; dan
4. Adanya teknologi informasi dan sistem yang memudahkan dan mempercepat pelaksanaan kegiatan.

Dari uraian faktor-faktor penghambat keberhasilan diatas, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan kinerja untuk Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Indikator yang belum tercapai untuk segera diakselerasi pencapaiannya di triwulan berikutnya;
2. Optimalisasi mekanisme koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan DIY dalam rangka akselerasi akses informasi regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan di Dinas Sosnakertrans;
3. Terhadap capaian keuangan, perlu adanya optimalisasi penyerapan anggaran kegiatan pada triwulan mendatang;
4. Rasionalisasi anggaran yang tidak terserap pada Perubahan APBD Tahun 2024.

### **BAB III**

## **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Perubahan Renja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perubahan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari perubahan kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023-2026 termasuk di dalamnya Tujuan serta Sasaran OPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Adapun tujuan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi diantaranya adalah:

1. Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
2. Menurunkan angka pengangguran;
3. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja;
4. Meningkatkan kualitas kerjasama transmigrasi;
5. Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sedangkan sasaran strategis dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi antara lain:

1. Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial
2. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
3. Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja
4. Meningkatnya kualitas kerjasama transmigrasi
5. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Perubahan Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi disusun pula untuk mengadopsi dinamika masyarakat dan kebijakan Pemerintah (baik Pusat, DIY maupun Daerah), khususnya saat ini berkaitan dengan fasilitasi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan. Pemberian fasilitasi bantuan iur jaminan ketenagakerjaan dalam rangka menindaklanjuti Hasil Kajian Pekerja Rentan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta; akan direalisasikan pada Perubahan APBD 2024. Anggaran iur jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja rentan diusulkan sebesar Rp. 75.667.200 ( 2.252 org x Rp. 16.800,- x2 bulan).

Adapun dalam penyusunan Perubahan Renja 2024 perlu juga memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Yogyakarta Tahun. Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi sehingga perlu dilakukan perubahan program / kegiatan / sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2024, baik berupa pergeseran pagu kegiatan/sub kegiatan, penghapusan kegiatan/sub kegiatan, penambahan kegiatan/sub kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan output dan target kinerja/pagu kegiatan/sub kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan/sub kegiatan.

Salah satu upaya pelaksanaan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dalam hal penanganan kemiskinan dan kerentanan sosial adalah dengan intervensi pemenuhan kebutuhan dasar antara lain melalui aktivitas pemberian bantuan sosial. Aktivitas pemberian bantuan ini merupakan perwujudan perlindungan sosial bagi kelompok kurang atau tidak potensial agar terlindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Jika tidak diberikan bantuan sosial, maka sasaran kelompok kurang atau tidak potensial tersebut akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup secara wajar. Dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial harus benar-benar berdasarkan ketentuan peraturan terkait antara lain yaitu Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial.

Mendasarkan pada:

1. Ketentuan peraturan bantuan sosial bahwa bantuan sosial tidak dapat diberikan secara terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu yaitu sampai dengan penerima bantuan terlepas dari resiko sosial;
2. Adanya fasilitasi pemberian bantuan sosial oleh pusat;
3. Adanya sasaran calon penerima bantuan belum mendapatkan intervensi program,

maka pada Perubahan Renja Tahun 2024 ini dialokasikan Bantuan Sosial APBD pada Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin (ASLUM) sebesar Rp. 820.200.000,- dengan target calon penerima sebanyak 1.367 jiwa (@ Rp. 300.000,- diberikan selama 2 bulan).

Terkait bantuan sosial Santunan Kematian (Sankem) diusulkan adanya peningkatan satuan besaran dana yang diberikan pada Perubahan 2024, yaitu sebesar @ Rp. 4.000.000,-/mending untuk 100 orang. Usulan peningkatan besaran satuan Santunan Kematian mempertimbangkan besarnya biaya bedah bumi yang mencapai Rp. 5.500.000,- di Kota Yogyakarta. Dengan demikian usulan anggaran bansos Sankem pada Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp. 400.000.000,-.

Selain Sankem, pada Perubahan 2024 diusulkan pula penambahan anggaran bansos Orang Terlantar Kehabisan Bekal melalui anggaran BTT, mengingat perlunya penyesuaian standard bantuan yang disepakati Kabupaten Kota se-DIY (semula Rp. 250.000,-/ orang menjadi Rp. 300.000,-/orang). Oleh karena itu diusulkan penambahan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (50 orang x Rp. 300.000,-).

Adapun bansos bagi Penyandang Disabilitas tidak dialokasi anggarannya mengingat fasilitasi bantuan untuk penyandang disabilitas telah tercukupi baik dari APBN maupun dari sumber dana lainnya. Dengan demikian secara keseluruhan anggaran Bantuan Sosial APBD dalam Renja Perubahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp. 1.078.200.000,- (pada Anggaran Kegiatan Dinsosnakertrans) dan sebesar Rp.3.455.000.000 ,- pada Belanja Tak Terduga (BTT) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rekapitulasi Bantuan Sosial Tahun 2024

#### I. OPERASIONAL

NO	SUB KEGIATAN	NAMA BANTUAN SOSIAL	BANSOS 2024 MURNI		BANSOS RENJA PERUBAHAN 2024	
			ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin (ASLUM)	-	-	820.200.000	1.367 Lansia x Rp 300.000 x 2 bulan
2	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	BLT DBHCHT	258.000.000	215 Orang x 2 Bulan @600.000	258.000.000	215 Orang x 2 Bulan @600.000
<b>TOTAL</b>			<b>258.000.000</b>		<b>1.078.200.000</b>	

**II. BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)**Tabel 3.2 Rekapitulasi Bantuan Sosial  
Belanja Bantuan Tidak Terduga tahun 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA BANTUAN SOSIAL</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Santunan Kematian	3.400.000.000,-	untuk 1.100 orang dengan rincian: Anggaran Murni 1.000 org x @ Rp 3.000.000,- = Rp. 3.000.000.000,-  Usulan Anggaran Perubahan 100 org x @ Rp. 4.000.000,- = Rp. 400.000.000,-
2	Bantuan Orang Terlantar Kehabisan Bekal	55.000.000,-	untuk 210 orang Anggaran Murni 160 orang x @ Rp. 250.000,- = Rp 40.000.000,-  Usulan Anggaran Perubahan 50 orang x @ Rp. 300.000,- = Rp. 15.000.000,-
	<b>TOTAL</b>	<b>3.455.000.000,-</b>	

Sementara itu bagi masyarakat yang potensial, dilakukan intervensi melalui aktivitas yang bersifat memberdayakan untuk membangun kesadaran serta mendorong kemandirian dan akses keluar dari kemiskinan dan atau kerentanan. Program pemberdayaan baik dari bidang sosial maupun ketenagakerjaan perlu ditempuh mengingat pemberian bantuan sosial secara terus menerus justru dapat melemahkan daya juang masyarakat. Salah satu upaya pemberdayaan bagi pencari kerja adalah pemberian pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi yang ditambahkan jenis dan volumenya meliputi Pelatihan Sosial Media Marketing DBHCHT bagi 21 orang;

Penyusunan program kerja tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemberlakuan produk hukum ini berimplikasi pada struktur program kerja dan penganggaran perangkat daerah. Pada urusan sosial, klasifikasi program kegiatan telah selaras dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang Sosial sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan demikian, program kerja yang telah direncanakan telah memuat

standar tersebut meliputi pelayanan rehabilitasi sosial dasar dan penanganan korban bencana skala kabupaten/kota pada saat dan setelah tanggap darurat.

Untuk Perubahan Anggaran Tahun 2024, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi merancang program kerja yang terdiri dari 1 program internal dan 9 program eksternal berdasarkan urusan pemerintah bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi dengan total anggaran sebesar Rp. 26.077.796.457,- atau bertambah sebesar Rp. 1.137.225.900,- (dari anggaran Murni 24.940.570.557,-).

Terdapat 5 program, 14 kegiatan dan 64 sub kegiatan urusan sosial. Sedangkan urusan tenaga kerja terdapat 4 program, 8 kegiatan dan 17 sub kegiatan. Pada urusan transmigrasi terdapat 1 program, 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan.

Program-program yang mengalami dinamika signifikan pada Anggaran Perubahan Tahun 2024 meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan dinamika penambahan anggaran pada:
  - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dikarenakan menyesuaikan kebutuhan rapat koordinasi;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dikarenakan penambahan Insentif Pendapatan karena target retribusi tenaga kerja asing meningkat dari sebelumnya 7 orang menjadi 8 orang, selain itu juga menyesuaikan perhitungan gaji dari BPKAD Kota Yogyakarta.
  - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, menambahkan anggaran untuk pengadaan lemari petugas layanan dan kursi pelayanan.
2. Program Rehabilitasi Sosial berkaitan dengan dinamika penambahan anggaran pada:
  - Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan pada UPT RPSLUT Budhi Dharma. Penambahan dikarenakan belanja bahan makan dan minum kelayan baru dianggarkan untuk 10 bulan. Pada Anggaran Perubahan 2024 ditambah 2 (dua) bulan (November dan Desember).
  - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial pada UPT RPSLUT Budhi Dharma. Penambahan dikarenakan honorarium instruktur baru dianggarkan 10 bulan. Pada Anggaran Perubahan 2024 ditambah 2 (dua) bulan (November dan Desember).
  - Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan pada UPT RPA Wiloso Projo. Penambahan dikarenakan belanja bahan makan dan minum kelayan baru dianggarkan untuk 10 bulan. Pada Anggaran Perubahan 2024 ditambah 2 (dua) bulan (November dan Desember).
3. Program Pemberdayaan Sosial bertambah anggaran pada sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota. Penambahan dikarenakan adanya kegiatan Gebyar Karang Taruna.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial berkaitan dengan dinamika anggaran pada
  - Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga bertambah anggarannya dikarenakan adanya kebijakan pembeian bantuan sosial Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin (ASLUM) sebesar Rp. 820.200.000,- dengan target calon penerima sebanyak 1.367 jiwa (@ Rp. 300.000,- diberikan selama 2 bulan).
  - Sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota anggarannya berkurang dikarenakan menghapus kegiatan Musyawarah Kelurahan.
5. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja bertambah anggaran pada sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi. Hal ini dikarenakan adanya penambahan pelatihan Social Media Marketing sebanyak 21 orang.
6. Program Penempatan Tenaga Kerja bertambah anggaran pada sub kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja. Hal ini dikarenakan untuk mengakomodir Bantuan Keuangan Khusus (BKK) DIY pada pelaksanaan padat karya di 2 (dua) lokasi yaitu Brontokusuman dan Kricak serta penambahan transport peserta Tenaga Kerja Mandiri sebanyak 2 (dua) angkatan.
7. Program Hubungan Industrial berkaitan dengan dinamika penambahan anggaran pada:
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan bertambah anggarannya karena Honor Dewan Pengupahan bertambah dari sebelumnya 5 orang/bulan menjadi 6 orang/bulan.
  - Sub kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja bertambah anggarannya karena mangakomodir Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian) sebanyak 2.252 orang selama 2 bulan.
8. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi berkaitan dengan dinamika anggaran pada:
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, anggarannya berkurang karena mengurangi volume peserta dan anggaran transport KIE Kelompok Transmigrasi.
  - Sub Kegiatan Pelatihan Transmigrasi bertambah anggarannya karena menyesuaikan standarisasi volume narasumber pelatihan transmigrasi (Standarisasi dari pusat).

Adapun Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Program dan Kegiatan) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2024 secara terinci adalah sebagaimana tabel 3.3. di bawah ini.

**Tabel 3.3 Rekap Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Program dan Kegiatan)  
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				21.878.425.019,00	22.491.298.996,00	23.518.262.996,00	1.639.837.977,00							23.200.513.340,00
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				18.011.262.184,00	18.023.639.731,00	18.716.749.731,00	705.487.547,00							19.508.600.581,00
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN				18.011.262.184,00	18.023.639.731,00	18.716.749.731,00	705.487.547,00							19.508.600.581,00
1,	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A Nilai	A Nilai	13.226.121.179,00	13.770.580.656,00	14.104.259.256,00	173.856.267,00							13.399.977.446,00
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	18 dokumen	18 dokumen	165.906.420,00	180.717.320,00	180.757.320,00	14.850.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		166.236.320,00
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	9.780.900,00	14.339.800,00	14.379.800,00	4.598.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk			10.110.800,00
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.570.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk			2.570.000,00
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.880.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	790.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk			1.880.000,00
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.748.720,00	3.938.720,00	3.938.720,00	1.190.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk			2.748.720,00
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.058.720,00	3.938.720,00	3.938.720,00	1.880.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk			2.058.720,00
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	11 Laporan	146.868.080,00	153.160.080,00	153.160.080,00	6.292.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			146.868.080,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	25 dokumen	27 dokumen	10.476.828.000,00	10.868.495.800,00	11.257.402.800,00	780.574.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kelancaran Administrasi, administrasi umum, keuangan dan operasional perkantoran		11.249.995.200,00
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	10.382.772.000,00	10.765.740.000,00	11.151.207.000,00	768.435.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			11.155.939.200,00
	1.06.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	11.00 Dokumen	13 Dokumen	94.056.000,00	102.755.800,00	106.195.800,00	12.139.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			94.056.000,00
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah	29 Laporan	29 Laporan	24.615.000,00	56.130.000,00	52.143.000,00	27.528.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kelancaran administrasi, administrasi umum, keuangan dan operasional perkantoran		33.140.000,00
	1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.320.000,00	2.280.000,00	1.725.000,00	-595.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.320.000,00
	1.06.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.740.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	-30.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.740.000,00
	1.06.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	14.780.000,00	3.990.000,00	2.909.000,00	-11.871.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			21.850.000,00
	1.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.740.000,00	4.536.000,00	3.864.000,00	2.124.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.610.000,00
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	2.610.000,00	42.189.000,00	41.613.000,00	39.003.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.610.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.06.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.425.000,00	1.425.000,00	322.000,00	-1.103.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.010.000,00
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	137 Dokumen	137 Dokumen	5.220.000,00	53.511.000,00	52.787.000,00	47.567.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kelancaran administrasi, administrasi umum, keuangan dan operasional perkantoran		8.700.000,00
	1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	76 Dokumen	12 Dokumen	1.740.000,00	50.034.000,00	49.428.000,00	47.688.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.220.000,00
	1.06.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	910.000,00	907.000,00	897.000,00	-13.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.740.000,00
	1.06.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	132 Dokumen	120 Dokumen	2.570.000,00	2.570.000,00	2.462.000,00	-108.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.740.000,00
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	24 Laporan	24 Laporan	692.958.160,00	652.426.986,00	664.216.136,00	-28.742.024,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kelancaran administrasi, administrasi umum, keuangan dan operasional perkantoran		706.636.702,00
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10.674.440,00	10.673.400,00	10.673.400,00	-1.040,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			8.705.440,00
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	9 Paket	110.089.120,00	111.940.836,00	106.742.986,00	-3.346.134,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			118.001.912,00
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	31.736.500,00	30.364.000,00	25.575.000,00	-6.161.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			32.002.750,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	4 Paket	4 Paket	29.428.100,00	29.343.750,00	23.543.750,00	-5.884.350,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			27.256.600,00
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	3 Dokumen	5.820.000,00	5.700.000,00	5.580.000,00	-240.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk			5.820.000,00
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	106 Laporan	110 Laporan	497.590.000,00	382.596.000,00	411.768.000,00	-85.822.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk			505.500.000,00
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	6.210.000,00	45.807.000,00	44.331.000,00	38.121.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk			7.900.000,00
	1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	1 Dokumen	2 Dokumen	1.410.000,00	36.002.000,00	36.002.000,00	34.592.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk			1.450.000,00
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah pengadaan barang milik Daerah</i>	16 jenis	16 jenis	135.786.800,00	217.052.350,00	246.206.700,00	110.419.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk	Kelancaran administrasi, administrasi umum, keuangan dan operasional perkantoran		0,00
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	4 Unit	16 Unit	58.198.900,00	57.450.000,00	88.313.900,00	30.115.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk			0,00
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	12 Unit	20 Unit	77.587.900,00	159.602.350,00	157.892.800,00	80.304.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk			0,00
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	36 Laporan	36 Laporan	1.230.069.224,00	1.208.983.000,00	1.206.583.000,00	-23.486.224,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk	Kelancaran administrasi, administrasi umum, keuangan dan operasional perkantoran		1.235.269.224,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	12 Laporan	3.800.000,00	83.048.000,00	82.852.000,00	79.052.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			9.000.000,00
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.400.000,00	8.400.000,00	7.596.000,00	-804.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk			8.400.000,00
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	12 Laporan	1.217.869.224,00	1.117.535.000,00	1.116.135.000,00	-101.734.224,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk			1.217.869.224,00
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	60 Jenis	60 Jenis	494.737.575,00	533.264.200,00	444.163.300,00	-50.574.275,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk	Kelancaran administrasi, administrasi umum, keuangan dan operasional perkantoran		0,00
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	25.100.000,00	25.030.000,00	21.380.300,00	-3.719.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk			0,00
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	47 Unit	312.587.575,00	285.720.200,00	219.775.000,00	-92.812.575,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk			0,00
	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	14 Unit	3.475.000,00	5.380.000,00	5.320.000,00	1.845.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk			0,00
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	78 Unit	43.575.000,00	55.284.000,00	35.838.000,00	-7.737.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk			0,00
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3 Unit	110.000.000,00	161.850.000,00	161.850.000,00	51.850.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan	91,27 %	91,99 %	641.206.760,00	616.031.100,00	630.726.100,00	-70.301.760,00							570.905.000,00
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang difasilitasi	6 Lembaga	6 Lembaga	641.206.760,00	616.031.100,00	630.726.100,00	-10.480.660,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan	Pekerja Sosial Masyarakat Kota Yogyakarta, TKS Kota Yogyakarta, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS),		570.905.000,00
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	105 Orang	85.950.000,00	114.930.000,00	114.930.000,00	28.980.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan			55.710.000,00
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang	14 Orang	177.583.000,00	171.834.000,00	171.834.000,00	-5.749.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan			177.583.000,00
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Keluarga	12 Keluarga	30.960.000,00	30.860.000,00	30.860.000,00	-100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan			30.960.000,00
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga	4 Lembaga	346.713.760,00	298.407.100,00	313.102.100,00	-33.611.660,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan			306.652.000,00
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2.Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 3.Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 4.Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 5.Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri 6.Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial 7.Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan ke daruratan sosial	1.100 % 2.100% 3.100% 4.100% 5.45,58% 6.90% 7.100%	1.100 % 2.100% 3.100% 4.100% 5.45,58% 6.100% 7.100%	1.432.348.345,00	1.029.413.825,00	1.020.880.225,00	350.292.800,00							1.782.641.145,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial 2. Jumlah lansia terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial 3. Jumlah Anak Terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial 4. Jumlah Anak Terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial 5. Jumlah kelompok masyarakat miskin dan rentan yang tergabung dalam KUBE dan USEP	1. 330 orang 2. 72 orang 3. 360 orang 4. 30 orang 5. 362 orang	1. 330 orang 2. 72 orang 3. 360 orang 4. 30 orang 5. 362 orang	878.019.000,00	559.985.800,00	555.209.200,00	-322.809.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Keluarga Penerima Manfaat yang tergabung dalam KUBE dan USEP, Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial		1.325.536.800,00
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														27.590.000,00
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	4.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan			
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														899.591.800,00
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	3620 Orang	3640 Orang	463.464.000,00	138.764.000,00	195.454.000,00	-268.010.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan			
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														122.656.000,00
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	260 Orang	230 Orang	122.656.000,00	126.880.000,00	98.050.000,00	-24.606.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan			
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak														9.320.000,00
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas	5 Orang	5 Orang	9.320.000,00	9.320.000,00	9.320.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan			
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														246.369.000,00
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	257.979.000,00	262.461.800,00	229.825.200,00	-28.153.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan			
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														2.280.000,00
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	2.280.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-680.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan														
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	350 Orang	17.730.000,00	16.370.000,00	16.370.000,00	-1.360.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			17.730.000,00
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani 2. Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan pengemis yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial 3. Jumlah Orang yang	1. 45 orang 2. 195 orang 3. 500 orang	1. 45 orang 2. 195 orang 3. 500 orang	554.329.345,00	469.428.025,00	465.671.025,00	-88.658.320,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani layanan keadurutan sosial		457.104.345,00
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang	174.297.345,00	90.434.225,00	90.434.225,00	-83.863.120,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			174.297.345,00
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	40 Orang	215.760.000,00	223.109.800,00	222.059.800,00	6.299.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			215.760.000,00
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	164.272.000,00	155.884.000,00	153.177.000,00	-11.095.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			67.047.000,00
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial 2. Persentase akurasi data sasaran intervensi kemiskinan	1. 89,25 % 2. -	1. 92,83 % 2. 100 %	2.034.791.030,00	1.973.912.500,00	2.332.602.500,00	1.043.490.940,00							3.078.281.970,00
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	144101 orang 38183 keluarga	144101 orang 38183 keluarga	2.034.791.030,00	1.973.912.500,00	2.332.602.500,00	297.811.470,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		3.078.281.970,00
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	144101 Orang	144101 Orang	1.599.861.030,00	1.635.880.500,00	1.206.196.500,00	-393.664.530,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.599.861.030,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	32229 Keluarga	38133 Keluarga	423.620.000,00	327.902.000,00	1.116.276.000,00	692.656.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan			1.058.420.940,00
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	50 Orang	11.310.000,00	10.130.000,00	10.130.000,00	-1.180.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan			420.000.000,00
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi	100 persen	100 persen	676.794.870,00	633.701.650,00	628.281.650,00	150,00							676.795.020,00
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	280 orang	280 orang	258.398.120,00	228.015.000,00	228.015.000,00	-30.383.120,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan	PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/keluarga		258.398.120,00
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	150 Orang	256.958.120,00	226.585.000,00	226.585.000,00	-30.373.120,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan			256.958.120,00
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	65 Orang	720.000,00	715.000,00	715.000,00	-5.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan			720.000,00
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	65 Orang	720.000,00	715.000,00	715.000,00	-5.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan			720.000,00
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencana	3 Organisasi Sosial	3 Organisasi Sosial	418.396.750,00	405.686.650,00	400.266.650,00	-18.130.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan			418.396.900,00
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana														
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3.00 Kampung	3.00 Kampung	2.160.000,00	2.156.000,00	2.156.000,00	-4.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan			2.160.000,00



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			<i>Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas</i>	20 Perusahan	20 Perusahan	18.893.150,00	18.893.000,00	18.893.000,00	-150,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PADYANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan			0,00
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja melalui IPK Online	75,69 %	53,11 %	778.991.250,00	885.531.250,00	1.097.281.250,00	0,00							778.991.250,00
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah layanan perluasan kesempatan kerja</i>	5 layanan	5 layanan	606.694.500,00	680.626.900,00	892.376.900,00	285.682.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan, Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja yang mengikuti		606.694.500,00
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan</i>	300 Orang	300 Orang	18.000.000,00	15.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PADYANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan			18.000.000,00
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD</i>	604 Orang	135 Orang	17.360.000,00	16.010.000,00	17.360.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PADYANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan			17.360.000,00
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja</i>	193 Orang	250 Orang	571.334.500,00	649.616.900,00	857.016.900,00	285.682.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PADYANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan			571.334.500,00
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	<i>Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar di IPK Online dan dari Pameran Bursa Kerja/Job Fair</i>	1350 orang	1350 orang	172.296.750,00	204.904.350,00	204.904.350,00	32.607.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan	Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub), Pencari Kerja yang Mendapatkan		172.296.750,00
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			<i>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)</i>	200 Orang	200 Orang	80.686.750,00	83.684.350,00	83.684.350,00	2.997.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PADYANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan			80.686.750,00
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja</i>	1350 Orang	1350 Orang	91.610.000,00	121.220.000,00	121.220.000,00	29.610.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PADYANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan			91.610.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	42,27 %	42,31 %	981.328.250,00	1.577.501.780,00	1.669.503.980,00	-18.736.000,00							962.592.250,00
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perjanjian kerja di perusahaan Jumlah perusahaan yang menerapkan struktur skala upah	40,26 % 448 Perusa haan	479 Perusaha an 120 Perusaha an	246.145.500,00	233.729.950,00	242.829.950,00	-3.315.550,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Seluruh Perusahaan di Kota Yogyakarta		227.409.500,00
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	25,00 Perusa haan	25,00 Perusa haan	18.736.000,00	21.712.250,00	21.712.250,00	2.976.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	15 Perusaha aan	15 Perusaha aan	13.987.250,00	16.895.500,00	16.895.500,00	2.908.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			13.987.250,00
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	362 Laporan	362 Laporan	213.422.250,00	195.122.200,00	204.222.200,00	-9.200.050,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			213.422.250,00
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial Jumlah Perusahaan yang sudah menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja	-	22 Kasus 745 Perusaha an	735.182.750,00	1.343.771.830,00	1.426.674.030,00	691.491.280,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Seluruh Perusahaan di Kota Yogyakarta		735.182.750,00
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4 Perkara	4 Perkara	186.008.500,00	204.016.950,00	204.016.950,00	18.008.450,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			186.008.500,00
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	24 Perkara	24 Perkara	21.378.000,00	23.749.500,00	21.874.500,00	496.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			21.378.000,00
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi														
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	2 Asosiasi dan Serikat Pekerja	2 Asosiasi dan Serikat Pekerja	94.318.000,00	78.102.500,00	74.102.500,00	-20.215.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			94.318.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah LKS Tripartit yang Dibina</i>	1 Lembaga	1 Lembaga	74.916.000,00	93.220.000,00	93.220.000,00	18.304.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan			74.916.000,00
	2.07.05.2.02.0005	Pembangunan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			<i>Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja</i>	159 Orang	159 Orang	358.562.250,00	944.682.880,00	1.033.460.080,00	674.897.830,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan			358.562.250,00
	3	URUSAN PEMERINTAHAN				225.237.425,00	226.881.425,00	224.029.225,00	-1.208.200,00							225.237.425,00
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN				225.237.425,00	226.881.425,00	224.029.225,00	-1.208.200,00							225.237.425,00
1.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	<i>Persentase peminat transmigrasi yang ditempatkan</i>	100 %	15 %	225.237.425,00	226.881.425,00	224.029.225,00	0,00							225.237.425,00
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah KK yang ditempatkan</i>	6 KK	6 KK	225.237.425,00	226.881.425,00	224.029.225,00	-1.208.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan, Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan, Kepala Keluarga		225.237.425,00
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	2 Laporan	2 Laporan	52.870.000,00	49.270.000,00	45.368.000,00	-7.502.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan			52.870.000,00
	3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan</i>	8 Kepala Keluarga	6 Kepala Keluarga	44.889.500,00	50.133.500,00	50.133.500,00	5.244.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan			44.889.500,00
	3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi														
			<i>Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan</i>	8 Orang	8 Orang	43.477.925,00	43.477.925,00	45.477.925,00	2.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan			43.477.925,00
	3.32.03.2.01.0007	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi														
			<i>Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi</i>	8 Kepala Keluarga	6 Kepala Keluarga	84.000.000,00	84.000.000,00	83.049.800,00	-950.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan			84.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		UPT RUMAH PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR				1.608.199.235,00	1.736.353.661,00	1.819.985.061,00	211.785.826,00							1.608.199.235,00
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN				1.608.199.235,00	1.736.353.661,00	1.819.985.061,00	211.785.826,00							1.608.199.235,00
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN				1.608.199.235,00	1.736.353.661,00	1.819.985.061,00	211.785.826,00							1.608.199.235,00
1,	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 persen	100 persen	1.608.199.235,00	1.736.353.661,00	1.819.985.061,00	0,00							1.608.199.235,00
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah lansia terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	65 orang	78 orang	1.608.199.235,00	1.736.353.661,00	1.819.985.061,00	211.785.826,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial		1.608.199.235,00
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang	60 Orang	944.638.000,00	975.011.800,00	1.050.753.200,00	106.115.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan			944.638.000,00
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang	60 Orang	111.341.000,00	111.341.000,00	108.741.000,00	-2.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan			111.341.000,00
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	1 Orang	18.830.000,00	19.255.000,00	19.255.000,00	425.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan			18.830.000,00
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang	60 Orang	533.390.235,00	630.745.861,00	641.235.861,00	107.845.626,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan			533.390.235,00
		UPT RUMAH PENGASUHAN ANAK WILOSOPROJO				770.911.000,00	712.917.900,00	739.548.400,00	-31.362.600,00							770.911.000,00
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN				770.911.000,00	712.917.900,00	739.548.400,00	-31.362.600,00							770.911.000,00
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN				770.911.000,00	712.917.900,00	739.548.400,00	-31.362.600,00							770.911.000,00
1,	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100 %	770.911.000,00	712.917.900,00	739.548.400,00	0,00							770.911.000,00
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Anak Terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	22 orang	22 orang	770.911.000,00	712.917.900,00	739.548.400,00	-31.362.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial		770.911.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	22 Orang	289.005.000,00	289.431.000,00	321.999.000,00	32.994.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan			289.005.000,00
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan	25 Orang	22 Orang	56.740.000,00	50.164.000,00	51.826.500,00	-4.913.500,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan			56.740.000,00
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	22 Orang	53.500.000,00	70.825.000,00	66.825.000,00	13.325.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan			53.500.000,00
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	25 Orang	22 Orang	200.736.000,00	144.216.000,00	144.216.000,00	-56.520.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan			200.736.000,00
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	22 Orang	170.930.000,00	158.281.900,00	154.681.900,00	-16.248.100,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan			170.930.000,00

## **BAB IV PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja disusun sebagai upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan teknis dari kebijakan pembangunan daerah untuk menjadi acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta ini menjadibahkan untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Perubahan yang merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Oleh karenanya kerjasama Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta sangat diperlukan agar program-program kerja tersebut dapat direalisasikan secara optimal.

Yogyakarta,            Juli 2024  
Kepala  
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kota Yogyakarta

ttd.

**Drs. Maryustion Tonang, M.M.**  
NIP. 19660614 199403 1 006